

Judul : Bukti pelanggaran etik MK lengkap
Tanggal : Sabtu, 04 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Bukti Pelanggaran Etik MK Lengkap

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang akan menyampaikan putusannya Senin lusa, diminta tegas untuk menyelamatkan wibawa MK.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam uji materi batas usia capres-cawapres telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli. MKMK pun diingatkan untuk betul betul tegas karena pemulihan muruah MK tergantung pada mereka.

Jimly menuturkan, tidak sulit untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. "Apalagi, kami sudah memeriksa CCTV. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali? Kenapa ada kisruh internal? Beda pendapat kok sampai keluar (ke publik)," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Dia mempertanyakan informasi rahasia yang bocor ke publik. Hal itu membuktikan adanya masalah. "Tentu ada masalah kolektif, ini sembilan hakim ada masalah. Ada soal pembiaran, ada soal budaya kerja."

Jimly menegaskan hakim MK seharusnya bersikap independen, boleh memengaruhi antarahakim asal menggunakan akal sehat. "Jangan akal bulus. Kasak-kusuk kepentingan itu kan akal bulus juga."

Seluruh saksi, kata Jimly, telah diminta keterangan dan MKMK tinggal merumuskan putusan atas 21 laporan yang diterima. Kemarin, mereka kembali meminta ket

rangan Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan. Anwar yang juga ipar Presiden Jokowi disebut sebut berperan atas dikabulkannya uji materi syarat batas usia capres-cawapres. Dengan putusan itu, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri sebagai cawapres meski usianya baru 36 tahun.

Jimly mengatakan, putusan MKMK terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK nanti bisa berdampak pada pendaftaran bacapres bacawapres. Karena itu, putusan akan disampaikan pada Senin (7/11) atau sebelum penetapan peserta Pilpres 2024 pada 13 November 2023. "Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami (MKMK) baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden," tutur Jimly.

Pertaruhan wibawa

Sejumlah kalangan mengingatkan, putusan MKMK yang memenuhi rasa keadilan publik menjadi kunci utama pemulihan wibawa MK. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeitry Sumampow pun mendorong MKMK menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan lurus. "Mudah mudahan mereka tetap berkomitmen menjaga muruah MK, tidak terjebak atau tidak terpengaruh dengan urusan politik yang berkecenderungan dalam putusan MK."

Menurutnya, apabila MKMK tidak mampu menghasilkan putusan yang jernih, akan muncul permasalahan lebih besar, yakni hilangnya kepercayaan publik kepada MK. Padahal, bangsa Indonesia akan menyambut Pemilu 2024 yang jika ada sengketa nanti menjadi urusan MK.